

BAB V

KESIMPULAN

Berada di sekitar sepuluh kilometer sebelah utara dari zona demiliterisasi Korea kawasan industri Kaesong merupakan proyek ekonomi terakhir yang dimiliki kedua Korea. Dalam proses perencanaan pembangunannya dimulai pada bulan Agustus 2000 yang ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak kesepakatan antara Perusahaan Hyundai dan Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara. Lalu, pada bulan November tahun 2002. Meskipun pada awalnya pembukaan Kawasan industri Kaesong merupakan inisiatif dari pemilik dari Hyundai Group yaitu Hyundai Asan namun kedua pemerintahan, Negara Korea Selatan maupun Korea Utara sama-sama terlibat di proyek kerjasama ini. Dalam pembagian perannya Negara Korea Utara menyediakan tempat pabrik beroperasi dan buruh pekerjanya. Korea Selatan mendapat peran sebagai penyedia dana, penyedia pabrik yang akan beroperasi dan teknologi yang digunakan di pabrik tersebut.

Perjalanan kawasan Industri Kaesong sebagai kawasan industri kerjasama dan satu-satunya proyek kerja sama ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara dan Korea Selatan memang tidak selalu berjalan mulus. Sejak dibuka pada tahun 2004 kawasan industri Kaesong kurang lebih sudah menyumbang sekitar 90 juta dollar tiap tahunnya pada perekonomian Korea Utara. Hingga pada tahun 2013 data dari kementerian unfikasi Korea menyatakan bahwa ada 123 perusahaan yang sudah berdiri dan melakukan kegiatan produksi. Buruh pekerja asal Korea Utara juga terhitung sekitar 53 ribu pekerja asal Korea Utara dan ada sekitar 800 pekerja asal Korea selatan. Meskipun kawasan industri Kaesong memberi banyak keuntungan ekonomi bagi Korea Utara namun itu tidak serta merta membuat Korea Utara menjadi lebih terkontrol.

Selama kurun waktu dari tahun 2004 sejak dibukanya kawasan industry Kaesong sudah dua kali kawasan industri Kaesong ditutup oleh Korea Utara. Penutupan yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2009 dan yang kedua pada tahun 2013. Dalam teorinya yaitu, pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin, dijelaskan bagaimana untuk memahami kebijakan yang diambil pengambil keputusan akan fenomena atau isu yang terjadi pada negaranya. Dalam bukunya, Coplin emngatakan bahwa dalam memahami suatu keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara maka terdapat tiga pertimbangan sebagai alat pemahaman penyebab negara untuk kemudian memutuskan suatu kebijakan politik luar negeri bagi negaranya. Tiga pertimbangan tersebut adalah: (1) konteks internasional (2) kondisi politik dalam negeri dan (3) kondisi ekonomi serta militer negara. Ketiga pertimbangan tersebut saling berkaitan hingga tercipta kebijakan dalam penyusunan politik luar negeri suatu Negara.

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, hal – hal yang menjadi pertimbangan aktor pengambil keputusan yang mana disini yang dimaksud adalah Kim Jong il dan Kim Jong Un dalam menutup kawasan industry Kaesong yang pertama adalah adanya latihan militer yang diadakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Selama ini Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menyatakan berdamai sejak perang semenanjung Korea yang terjadi pada tahun 1950. Hal ini membuat Korea Utara terus waspada akan kebijakan Korea Selatan yang berhubungan dengan kedua korea yang mana dalam konteks ini adalah latihan militer yang diadakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sudah dua kali kawasan industry Kaesong ditutup pada saat berlangsungnya latihan militer yang dilakukan di semenanjung Korea tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh pemerintah Korea Utara dan menganggap latihan militer ini sebagai protes akan berlangsungnya latihan militer

tersebut yang dianggap provokasi untuk berperang. Kedua, dalam segi ekonomi Korea Utara sudah mengalami keadaan miskin sejak blok sosialis runtuh pada pertengahan tahun 1990an. Karena keadaan tersebut Korea Utara menjadi keadaan yang bergantung pada bantuan luar negeri yang mana disini adalah China yang merupakan mitra kerja sama ekonomi terbesarnya. Pada tahun 2013 berdasarkan data dari kementerian unifikasi jumlah persentase perdagangan antara China dengan Korea Utara mencapai lebih dari 80% dari total perdagangan ekonomi Korea Utara. Keadaan ini membuat Korea Utara menjadi lebih tergantung kepada China pada perekonomiannya. Dalam konteks ini hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Korea Utara dalam menutup kawasan industry Kaesong karena perekonomiannya yang tidak terlalu bergantung pada Korea Selatan dan masih memiliki partner aliansi kerjasama yaitu China. Dalam segi militer, Korea Utara memiliki keunggulan banyak dibandingkan dengan militer Korea Selatan karena jumlah belanja militer Korea Utara yang mencapai 30% dari total GDP. Selain itu Korea Utara juga mengembangkan teknologi senjata nuklir sehingga Korea Utara disini mempunyai posisi tawar yang lebih terhadap Negara lain. Ketiga, yaitu adanya dukungan partai politik yang berkuasa yaitu WPK kepada keputusan rezim pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari peran WPK untuk memutuskan keputusan luar negeri dimana pemimpin rezim juga merupakan ketua dari partai ini. Berarti dalam mengambil keputusan, disini partai politik yaitu WPK mempunyai pengaruh akan kebijakan yang akan diputuskan oleh aktor pengambil keputusan

Ketiga pertimbangan tersebut merupakan faktor – faktor yang membuat pemerintah Korea Utara untuk memutuskan menutup Kawasan Industri Kaesong. Meskipun kawasan industry tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan bagi Korea Utara namun hal tersebut tidak cukup menjadi alasan pemerintah Korea Utara untuk tidak menutup kawasan industry Kaesong hingga dua kali

